

PROSIDING

SEMINAR INTERNASIONAL

PERTEMUAN ILMIAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (PIBSI) XXXVI

Yogyakarta, 11-12 Oktober 2014

Membangun Citra Indonesia di Mata Internasional melalui Bahasa dan Sastra Indonesia

Editor

Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum.

Dra. Triwati Rahayu, M.Hum.

Wachid Eko Purwanto, M.A.

Roni Sulistiyono, M.Pd.

Yosi Wulandari, M.Pd.

Penyunting Bahasa

Dedi Wijayanti, M.Hum.

Siti Salamah, M.Hum.

Hermanto, M.Hum.

M. Ardi Kurniawan, M.A.

Denik Wirawati, M.Pd.

Iis Suwartini, M.Pd.

**Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PROSIDING
SEMINAR INTERNASIONAL**

**Membangun Citra Indonesia di Mata Internasional
melalui Bahasa dan Sastra Indonesia**

Editor

Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. Dra. Triwati Rahayu, M.Hum.
Wachid Eko Purwanto, M.A. Roni Sulistiyono, M.Pd.
Yosi Wulandari, M.Pd.

Penyunting Bahasa

Dedi Wijayanti, M.Hum. Siti Salamah, M.Hum.
Hermanto, M.Hum. M. Ardi Kurniawan, M.A.
Denik Wirawati, M.Pd. Iis Suwartini, M.Pd.

Penerbit

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka, No.42, Sidikan, Yogyakarta, 55161
Telp.(0274) 563515, 511830, 379418, 371120, Fax. (0274) 564604
Website: www.pbsi.uad.ac.id
Email: pbsiuad@yahoo.co.id

Cetakan 1, Oktober 2014
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

ISBN 978-602-17348-1-0

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

11. MEMBANGUN BUDAYA KERJA UNGGUL DIKENDIRIKAN JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA: UPAYA MENGHASILKAN LULUSAN YANG MAMPU MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL	
<i>Bambang Hartono</i>	215
12. NOVEL DI KAKI BUKIT CIBALAK KARYA AHMAD TOHARI: KISAH TENTANG PERUBAHAN SOSIAL DARI DESA	
<i>Bambang Lelono & Roch Widjatini</i>	231
13. KESANTUNAN BAHASA PERMOHONAN HADIR DALAM TEKS SURAT UNDANGAN PERKAWINAN BERDASARKAN SKALA PRAGMATIK LEECH	
<i>Benedictus Sudiyana</i>	239
14. PENGAJARAN BIPA SEBAGAI <i>SOFT POWER</i> DIPLOMASI BUDAYA (BERBAGI PENGALAMAN DARI POLANDIA)	
<i>Beniati Lestiyarini</i>	251
15. DAMPAK BAHASA GAUL TERHADAP KARAKTER BANGSA	
<i>Bivit Anggoro Prasetyo Nugroho</i>	261
16. WUJUD RELIGI DALAM NOVEL-NOVEL MELAYU TIONGHOA	
<i>Dedi Pramono</i>	267
17. PENERAPAN LAGU-LAGU ANAK KARYA SIGIT BASKARA: SEBUAH ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI KELAS RENDAH	
<i>Dedi Wijayanti</i>	273
18. PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PEMBELAJARAN MENYIMAK KONSENTRATIF DENGAN MEDIA AUDIO	
<i>Denik Wirawati</i>	283
19. PERAN SASTRA ANAK UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI MUDA YANG BERKARAKTER	
<i>Desy Rufaidah</i>	293
20. ALTERNATIF MODEL INKUIRI SOSIAL MELALUI KARYAWISATA DALAM KETERAMPILAN MENULIS PUISI	
<i>Desyarini Puspita Dewi</i>	299
21. GAYA BAHASA SASTRA ANAK: CARA ANAK MENUNJUKKAN EKSPRESI	
<i>Dina Nurmalisa</i>	305
22. IMPLIKATUR DALAM RETORIKA POLITIK GERAKAN NASIONAL SALAM GIGIT JARI	
<i>Dwi Budiyanto</i>	309
23. PERKAWINAN ANTAR RAS DALAM PANDANGAN PENGARANG PERANAKAN TIONGHOA DI ERA KOLONIAL	
<i>Dwi Susanto</i>	319

IMPLIKATUR DALAM RETORIKA POLITIK GERAKAN NASIONAL SALAM GIGIT JARI

Dwi Budiyanto | email: dwi_budiyanto@uny.ac.id.

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Email: matahati01@yahoo.com

Abstract

The study aims to describe the form of implicature in political rhetoric. This research belongs to qualitative research through discourse analysis of the political rhetoric of Gerakan Nasional Salam Gigit Jari (GNSGJ). Data are collected through a careful record keeping. The validity of the data is done by data triangulation in terms of reliability and validity. The validity of the data is obtained through semantic validity, while the reliability is gained by reading, reviewing (intra-rater), and discussion with colleagues (inter-rater). Analyzing the data is done by using comparative-inductive technique, categorization, data presentation, and making inferences. The implicature in GNSGJ political rhetoric can be categorized into two ways, namely (1) implicature of speech act in the political rhetoric objecting Jokowi-JK and (2) implicature of speech act in political rhetoric supporting Jokowi-JK. Both forms are directed to one purpose, namely the implicature of the inconsistency against Jokowi-JK's political promises. The further motive is the appeal not to trust any forms of political promises and commitment from Jokowi-JK. The overall form of political rhetoric promoted by GNSGJ is negative campaign against Jokowi-JK.

Keywords: *implicature, political rhetoric, negative campaign*

PENDAHULUAN

Sebuah lembaga riset dunia digital yang terdaftar di bursa saham New York (Nasdaq), pada 11 Agustus 2010, melaporkan Indonesia telah menjadi negara yang paling aktif dalam berjejaring sosial. Penetrasi pengguna jejaring sosial *Twitter* tumbuh terbesar di Indonesia (20,8% dari *internet users*), diikuti Brazil, Venezuela, Belanda, dan Jepang. Selain itu, *Facebook* dan *Blog* juga menjadi komunitas jejaring sosial yang sangat penting. Pada akhir 2009, Indonesia menempati urutan kelima di dunia yang penduduknya menggunakan *Facebook*. Pada bulan Agustus 2010 posisinya telah menjadi nomor tiga, menggeser Perancis dan Italia (Kasali, 2011: 37). Fenomena ini telah menjadikan Indonesia berubah drastis dari beberapa dekade sebelumnya.

Keberadaan jejaring sosial (*social network*) telah menjadikan masyarakat Indonesia lebih interaktif dan saling terhubung satu dengan lainnya. Komunitas ini saling membentuk opini, mengabarkan peristiwa-peristiwa teraktual dengan lebih cepat, merekomendasikan produk atau jasa yang mereka pakai, memberikan pembelaan dan kritik sosial, belajar tentang hal-hal baru, sekaligus saling memengaruhi preferensi politik orang lain. Kecenderungan ini telah mengubah pola kehidupan masyarakat, tidak saja di bidang bisnis dan usaha, tetapi juga politik. Jejaring sosial telah menjadikan pola komunikasi politik menjadi sangat terbuka. Pesan-pesan politik, baik yang positif maupun negatif, dapat tersebar lebih luas dan cepat. Proses produksi pesan dalam pemilihan umum pun tidak lagi satu arah dari tim sukses, tetapi sekaligus dapat berasal dari relawan pendukung, bahkan juga dapat berasal dari lawan politik dan pendukungnya.

Akhirnya, pemilihan umum seringkali tidak hanya menandai adanya peristiwa politik. Pada kenyataannya, ia juga disertai adanya peristiwa kebahasaan. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaan Pilpres 2014 yang mengusung dua pasang kandidat, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Pertarungan politik ternyata tidak hanya terjadi di arena debat terbuka calon presiden. Pertarungan politik jauh

lebih sengit terjadi di jejaring sosial. *Twitter* dan *Facebook* telah menjadi sarana untuk mengonstruksi pesan-pesan politik berdasarkan kepentingan masing-masing kandidat. Para pendukung kandidat tertentu dapat mengonstruksi pencitraan positif bagi kandidatnya, sekaligus menciptakan citra negatif pada lawan politiknya. Dalam hubungannya dengan pemilu presiden dan wakil presiden, hampir semua calon diterpa isu kampanye negatif (Cangara, 2009: 366). Prabowo dikait-kaitkan kembali dengan isu pelanggaran HAM pada peristiwa Mei 2008. Sementara itu, Jokowi disudutkan sebagai kurang religius dan hanya menjadi 'boneka' Megawati. Pada setiap pesan politik yang disebar melalui jejaring sosial, konstruksi pesan tersebut selalu dilakukan melalui media bahasa.

Ketika proses Pilpres 2014 telah berakhir dengan ditandai oleh kemenangan pasangan Jokowi-JK, aktivitas politik media di jejaring sosial rupa-rupanya tidak berakhir. Sebagaimana proses pencitraan politik kandidat terpilih terus dilakukan, proses kampanye negatif dari koalisi oposisi pun tidak berhenti. Proses ini sebenarnya berlangsung bergantian. Salah satu kampanye negatif yang muncul pasca pemilihan presiden adalah tersebarnya pesan-pesan politik yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Salam Gigit Jari. Pada Senin (1/9/2014) akun *Salam Gigit Jari* mengunggah video berdurasi 1 menit 55 detik yang berisi plesetan lagu Slank, *Salam Dua Jari*. Lagu berjudul *Salam Gigit Jari* itu tampaknya sengaja ditujukan untuk menyerang Jokowi beserta pendukungnya. Video tersebut telah ditonton lebih dari 29.315 *viewers*, di-likes oleh 909 pengguna dan memperoleh 227 *dislikes* (*Bisnis.com*, 6/9/2014). Unggahan video tersebut langsung menuai pro-kontra di jejaring sosial.

Setelah unggahan video tersebut, akun *@SalamGigitJari* kembali mengunggah sejumlah gambar berisi pesan-pesan retorika politik di *Twitter*. Seluruh pesan retorika politik tersebut dikonstruksi dan diarahkan untuk menyerang Jokowi dan pendukungnya. Hampir sebagian besar pesan-pesan tersebut merupakan potongan berita yang berisi pernyataan beberapa tokoh yang mulai mengkritik kebijakan Jokowi, terutama berkaitan dengan proses pelibatan dan penyusunan kabinet. Selain berisi potongan pernyataan, gambar-gambar tersebut juga menampilkan potongan berita selama kampanye politik menjelang pilpres dan setelah pilpres berlangsung, terutama ketika Jokowi-JK dinyatakan menang dalam pemilu.

Dilihat dari sudut pandang pragmatik, pesan-pesan politik yang diunggah akun *@SalamGigitJari*, yang terlihat menempatkan diri sebagai oposisi presiden terpilih itu, memiliki banyak implikatur. Meskipun diunggah pascapilpres, pesan-pesan retorika politik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye, terutama kampanye negatif (*negative campaign*). Hanya saja tujuannya tidak lagi untuk memengaruhi preferensi politik. Ada tujuan dan maksud tertentu di balik pesan-pesan retorika politik tersebut yang perlu dianalisis. Dengan demikian, kajian implikatur terhadap pesan-pesan retorika politik yang diunggah akun *@SalamGigitJari* di jejaring sosial dianggap penting karena terikat konteks untuk menjelaskan maksud implisit dari tindak tutur penuturnya. Oleh karena itu, artikel ini berusaha menganalisis bentuk implikatur retorika politik dari pesan-pesan gambar dari akun *@SalamGigitJari* tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis wacana. Analisis wacana digunakan untuk mengungkap bentuk implikatur retorika politik Gerakan Nasional Salam Gigit Jari (GNSGJ) yang muncul pascapilpres 2014. Sumber data dalam penelitian ini berupa pesan-

pesan politik yang diunggah oleh akun jejaring sosial *Twitter*, @SalamGigitJari. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pesan-pesan politik yang berupa gambar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pencatatan secara cermat.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dari segi reliabilitas dan validitas. Validitas data diperoleh melalui validitas semantis, sedangkan reliabilitas data diperoleh dengan cara baca, kaji ulang (*intra-rater*), dan diskusi dengan sejawat (*inter-rater*). Teknik analisis data dilakukan dengan teknik komparatif-induktif, kategorisasi, penyajian data, dan pembutan inferensi.

PEMBAHASAN

Implikatur dalam Retorika Politik

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan upaya untuk menyampaikan ide, pesan, serta motif-motif politik tertentu. Dalam hal ini, bahasa menjadi sarana paling efektif. Pada kenyataannya, bahasa dalam komunikasi politik tidak hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, tetapi juga digunakan untuk menciptakan realitas yang diinginkan penutur. Hanya saja, realitas yang dikonstruksi dalam komunikasi politik lebih sering sebagai realitas yang telah termanipulasi.

Dalam komunikasi politik, sebuah fakta yang disajikan tidak dapat dipahami sekedar sebagai realitas belaka. Ia harus dipahami dalam konteks motif politik yang menyertainya. Dengan demikian, retorika politik sebagai bagian dari komunikasi politik selalu memiliki makna yang dibentuk oleh motif –motif politik. Itulah sebabnya, dalam konteks kajian tindak tutur (*speech act*), retorika didefinisikan sebagai kajian terhadap perlokusi dari suatu ujaran (Partington, 2003: 212). Artinya, yang menjadi fokus kajian adalah menjelaskan makna implisit dari tindak tutur penuturnya. Bentuk-bentuk tuturan yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan itulah yang disebut sebagai implikatur. Dengan kata lain, implikatur merupakan maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan yang tersembunyi (Mulyana, 2005: 11).

Dalam praktiknya, terutama dalam retorika politik, ada kalanya penciptaan strategi-strategi dalam memproduksi tuturan, penutur harus mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan yang dimaksudkannya karena tujuan tertentu, sehingga ujaran yang disampaikan bermakna implisit (Wijana dan Rohmadi, 2009: 296). Dalam konteks komunikasi politik di Indonesia, pascapilpres 2014, sebuah akun di jejaring sosial *twitter*, yaitu @SalamGigitJari mengunggah pesan-pesan politik, yang sebagian besarnya merupakan potongan pernyataan beberapa tokoh atau isi pemberitaan tertentu, terutama yang dianggap menyudutkan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK. Salah satu pesan tersebut adalah kutipan pernyataan Suciwati Munir, istri aktivis HAM, Munir. *“Ulah Jokowi menunjuk Hendro (sebagai penasihat Tim Transisi) adalah hal yang memalukan. Kalau mau berpolitik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain. Seorang presiden tak selayaknya mengatakan ‘rapopo (tak apa-apa)’ terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro.”*

Kutipan pernyataan yang ditampilkan kembali sebagai pesan politik tidak dapat hanya dipahami sebagai sebuah kutipan pernyataan seorang tokoh saja. Sekali lagi, dalam kajian tindak tutur, pesan politik tersebut jelas memiliki motif politik tertentu atau maksud-maksud tertentu yang implisit, bahkan tidak terungkap. Tidak adanya keterkaitan semantis antara suatu tuturan dengan yang diimplikasikan, maka dapat diperkirakan bahwa sebuah tuturan akan memungkinkan menimbulkan implikatur yang tidak terbatas jumlahnya (Wijana, 1996: 38-39).

Tindak Tutur sebagai Pengungkap Implikatur Retorika Politik

Wijana dan Rohmadi (2009: 298) menjelaskan bahwa tindak tutur yang digunakan penutur dan lawan tutur dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tujuan tuturan. Dalam konteks komunikasi politik, pengungkapan pesan-pesan politik yang dilakukan Gerakan Nasional Salam Gigit Jari, yang bermuatan negatif terhadap lawan politik mereka dapat dikategorikan sebagai kampanye negatif (*negative campaign*). Sebenarnya, dalam pandangan Lau & Rovner (2009: 285), kampanye negatif dinilai buruk bagi proses demokrasi. Namun demikian, menurut Cangara (2009: 367), model kampanye hitam justru perlu dilakukan agar pemilih tidak kehilangan akal untuk merekam jejak calon pemimpinnya.

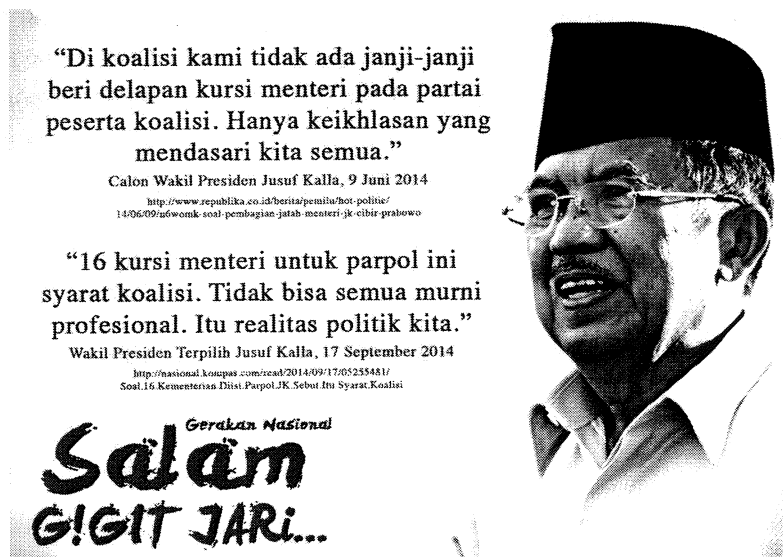
Faktor tujuan tuturan dalam kampanye politik biasanya digunakan untuk meningkatkan daya persuasif politik, yaitu memengaruhi preferensi politik pemilih agar publik memilih atau tidak memilih kandidat tertentu. Namun, karena ungahan pesan retorika politik yang dilakukan Gerakan Nasional Salam Gigit Jari dilakukan pascapilpres, ketika kandidat terpilih telah ditetapkan, maka tujuan tuturan tidak lagi diarahkan untuk memengaruhi preferensi politik pemilih dalam pemilu. Tujuan utamanya adalah untuk mengonstruksi citra negatif. Dalam konteks ini, sebagaimana dinyatakan Gupta (2000: 251), kampanye negatif dinilai lebih efektif mendiskriminasi citra kandidat.

Dalam konteks fenomena komunikasi politik pascapilpres, kampanye negatif yang dilakukan Gerakan Nasional Salam Gigit Jari (GNSGJ) dimanfaatkan untuk membentuk citra negatif calon presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK serta para pendukungnya. Oleh karena itu, berdasarkan objek kampanye negatif yang diunggah, implikatur retorika politik GNSGJ dapat diarahkan pada dua hal, yaitu (1) implikatur dari tindak tutur retorika politik yang menasar Jokowi-JK dan (2) implikatur dari tindak tutur retorika politik yang menasar pendukung Jokowi-JK. Sebenarnya, serangan kampanye negatif yang ditujukan kepada pendukung Jokowi-JK pada akhirnya juga diarahkan pada Jokowi-JK dan tidak semata-mata ditujukan pada para pendukungnya.

1. Implikatur dari Tindak Tutur Retorika Politik yang Menasar Jokowi-JK

Beberapa pesan politik yang diunggah melalui jejaring sosial berisi kampanye negatif yang ditujukan kepada Jokowi JK. Pesan-pesan tersebut disajikan secara sederhana, berupa potongan pernyataan atau berita tertentu. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk penyajian tindak tutur retorika politik yang diunggah GNSGJ, yaitu *pertama*, kutipan berita yang dipertentangkan. Biasanya berupa berita yang memuat pernyataan Jokowi atau Jusuf Kalla selama masa kampanye, yang berupa janji-janji politik, dan pernyataan terbaru yang dianggap bertentangan. *Kedua*, menampilkan testimoni tokoh yang kecewa dengan kebijakan Jokowi-JK beserta Tim Transisi. Kutipan pernyataan tersebut, biasanya, disertai foto tokoh yang menyatakan dan dilengkapi dengan identitas GNSGJ.

Salah satu pesan yang dikonstruksi GNSGJ adalah pesan retorika politik yang berusaha mempertentangkan pernyataan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla. Dua pernyataan yang dianggap saling bertolak belakang tersebut disajikan sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Pernyataan Jusuf Kalla yang Saling Dipertentangkan dalam Pesan Politik GNSGJ

Berdasarkan gambar 1 di atas, terdapat dua pernyataan Jusuf Kalla yang dikutip GNSGJ. (1) *Di koalisi kami tidak ada janji-janji beri delapan kursi menteri pada partai peserta koalisi. Hanya keikhlasan yang mendasari kami semua.* Pernyataan tersebut disampaikan JK pada 9 Juni 2014 dan dimuat di www.republika.co.id dengan judul berita "*Soal Pembagian Jatah Menteri, JK Cibir Prabowo.*" Dilihat dari tindak tutur ilokusinya JK menyatakan bahwa koalisi pasangan Jokowi-JK dibangun atas dasar keikhlasan bergerak, tanpa syarat, dan bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada koalisi pasangan Prabowo-Hatta. (2) *16 kursi menteri untuk parpol ini syarat koalisi. Tidak bisa semua murni profesional. Ini realitas politik kita.* Pernyataan tersebut disampaikan JK pada 17 September 2014 dan dimuat di <http://nasional.kompas.com> dengan judul "*Soal 16 Kementerian Diisi Parpol, JK Sebut Itu Syarat Koalisi.*" Dilihat dari tindak tutur ilokusinya, pernyataan JK yang kedua terlihat bertolak belakang dengan pernyataan pertama. Pada pernyataan pertama JK menyatakan bahwa koalisi dibangun tanpa syarat bagi-bagi kursi kementerian, tetapi pada pernyataan kedua JK menegaskan bahwa terdapat 16 kementerian yang disediakan bagi partai koalisi sebagai syarat koalisi dan merupakan realitas politik yang tidak dapat dihindari.

Pertentangan tindak tutur ilokusi (1) dan (2) yang disajikan dalam pesan retorika politik di atas memiliki implikatur bahwa JK (termasuk Jokowi dan Tim Transisi tentunya) dianggap inkonsisten terhadap janji-janji politiknya. Implikatur inkonsisten terhadap janji politik tersebut ditandai dengan mempertentangkan kata *keikhlasan* dengan *syarat koalisi*. Kata *keikhlasan* pada data (1) merupakan janji komitmen bahwa koalisi Jokowi-JK karena dasar kepentingan rakyat, bukan bagi-bagi kekuasaan. Sementara itu, pada frasa *syarat koalisi* menunjukkan bahwa bagi-bagi kekuasaan (kementerian) merupakan realitas politik yang dipersyaratkan dalam koalisi. Ini sekaligus membentuk implikatur bahwa inkonsistensi pasangan Jokowi-JK terhadap janji-janji politiknya terjadi karena mereka dinilai memberikan janji berlebihan dan tidak mempertimbangkan realitas politik. Oleh karena itu, tindak perlokusi yang muncul adalah himbauan tidak langsung untuk tidak percaya pada Jokowi-JK.

Implikatur tentang inkonsistensi janji-janji politik tersebut ternyata tidak hanya berkaitan dengan jatah menteri bagi partai politik pendukung koalisi, tetapi juga pada tindakan yang dianggap kontradiktif dengan janji-janji politik. Pada gambar 1 terlihat proses mempertentangkan tindak tutur tersebut terjadi antara satu pernyataan dengan pernyataan lain di media. Hal yang berbeda terdapat pada data berikut ini. Dua judul berita di media *online* saling dipertentangkan untuk menunjukkan implikatur tertentu.



Gambar 2. Berita tentang Jokowi yang Saling Dipertentangkan dalam Pesan Politik GNSGJ

Gambar 2 memperlihatkan pesan politik disusun dengan cara mempertentangkan antara satu berita dengan berita yang lain. Dalam konteks pesan politik di atas, keseluruhan berita tidak dicantumkan, yang disajikan hanyalah judul berita. Hal ini mungkin dianggap telah cukup untuk mewakili keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Tindak tutur (1) pada gambar 2, yaitu *BI Akui Rupiah Menguat karena Jokowi*. Pernyataan tersebut diungkapkan Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dan dimuat di *www.merdeka.com* pada 10 Juli 2014 dengan judul asli "*BI Akui Penguatan Rupiah Imbas Jokowi Menang Versi Quick Count.*" Judul tersebut disajikan ulang dengan perubahan. Dilihat dari tindak tutur ilokusnya, berita tersebut menjelaskan bahwa kemenangan Jokowi meningkatkan ekspektasi investor yang ditandai oleh penguatan rupiah.

Tindak tutur (1) tersebut dipertentangkan dengan tindak tutur (2) pada gambar 2, yaitu *Kecewa dengan Komposisi Kabinet Jokowi, IHSG Ditutup Melemah 14,39 Poin*. Konteks berita tersebut dimuat di <http://bisniskeuangan.kompas.com> pada 16 September 2014. Berbeda dengan tindak tutur (1), pada tindak tutur ilokusi data (2) dari gambar 2 terlihat bahwa respon pasar berubah menjadi negatif karena komposisi kabinet Jokowi yang memberikan jatah besar pada partai politik. Kedua tindak tutur tersebut disandingkan untuk dipertentangkan satu dengan yang lain. Implikatur yang muncul dari pesan politik pada gambar 2 di atas adalah bahwa respon pasar terhadap pemerintahan yang akan dibentuk Jokowi berubah semakin melemah, setelah sebelumnya menguat. Hal ini disebabkan sikap inkonsisten pasangan Jokowi-JK dalam penyusunan kabinet. Itu artinya, pasar cenderung merespon sinis terhadap sikap inkonsisten Jokowi-JK.

Implikatur inkonsistensi janji politik Jokowi-JK muncul pada pesan politik yang menyajikan kritik Suciwati Munir, istri aktivis HAM, Munir terhadap pengangkatan AM Hendropriyono, mantan kepala BIN, sebagai penasihat Tim Transisi. Pesan politik di bawah ini memperlihatkan hal tersebut.



Ulah Jokowi menunjuk Hendro (sebagai penasihat Tim Transisi) adalah hal yang memalukan. Kalau mau berpolitik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain. Seorang presiden tak selayaknya mengatakan 'rapopo (tak apa-apa)' terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro.

- Suciwati Munir -

Gerakan Nasional
**Salam
GIGIT JARI...**

Gambar 3. Pernyataan Suciwati Munir dalam Pesan Politik GNSGJ

Tindak tutur pada gambar 3, berupa pernyataan Suciwati Munir, istri aktivis HAM Munir. Kutipan tersebut sebenarnya dimuat sebagai berita di *www.tempo.com* pada 17 Agustus 2014 dengan judul "Istri Munir: Jokowi Lakukan Kesalahan Pertama." Pesan politik tersebut jelas tidak hanya bermaksud menampilkan pernyataan Suciwati. Ada maksud implisit yang ingin disampaikan dengan cara menyajikan kembali kritikan Suciwati kepada Jokowi. Tindak tutur ilokusi dari pernyataan Suciwati yang dikutip di atas adalah bahwa (1) Letnan Jenderal (Purn) AM Hendropriyono diduga terlibat dalam pelanggaran HAM, terutama peristiwa Talangsari Lampung dan pembunuhan aktivis HAM, Munir, (2) penunjukan AM Hendropriyono dianggap salah, (3) Jokowi dianggap dinilai terlalu abai dan meremehkan persoalan pelanggaran HAM. Kata *memalukan* dimunculkan untuk menilai bahwa penunjukan AM Hendropriyono, sebagai penasihat Tim Transisi, menunjukkan makna ketidakpantasan. Ketidakpantasan tersebut terjadi karena *dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro*. Sasaran utama pesan ini sebenarnya untuk melakukan kampanye negatif terhadap Jokowi. Implikatur yang muncul adalah bahwa Jokowi, yang pernah berjanji akan menegakkan HAM, dinilai mengingkari janjinya tersebut dengan cara mengangkat AM Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi yang akan menentukan komposisi menteri. Perlokusi lebih lanjut adalah ajakan agar masyarakat tidak lagi percaya pada janji-janji politik Jokowi-JK.

2. Implikatur dari Tindak Tutur Retorika Politik yang Menyasar Pendukung Jokowi-JK

Selain menyerang Jokowi-JK secara langsung, pesan-pesan politik GNSGJ juga berusaha menampilkan karakter pendukungnya yang berambisi terhadap kekuasaan. Pernyataan-pernyataan pendukung Jokowi-JK yang dianggap dapat dikonstruksi untuk menciptakan kesan negatif diambil dan disebar. Salah satu pernyataan yang dikutip dan dikonstruksi untuk maksud politik tertentu adalah pernyataan Muhaimin Iskandar. Data berikut ini akan memperjelas gambaran di atas.



Gambar 4. Pernyataan Muhaimin Iskandar dalam Pesan Politik GNSGJ

Tindak tutur pada pada gambar 4 di atas, yaitu *Pemenang Pilpres kemarin ditentukan oleh pemilih Jawa Timur. Oleh PKB. Tapi sekarang PKB tidak dilibatkan di Tim Transisi. Pak Jokowi sudah lupa akan jasa saya dan PKB...Kalau sudah begini bukan salam dua jari, tapi siap-siap PKB salam gigit jari*. Dilihat dari tindak tutur ilokusinya Muhaimin Iskandar menyampaikan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam Tim Transisi. Padahal, ia merasa berjasa atas kemenangan Jokowi di Jawa Timur. Kalimat *Pak Jokowi sudah lupa dengan jasa saya dan PKB* tidak diarahkan pada maksud bahwa Jokowi melupakan pendukungnya. Secara implikatur makna yang ingin dibangun adalah bahwa ternyata koalisi yang katanya dibangun tanpa syarat itu hanya kebohongan belaka.

Hal tersebut diperjelas dengan kalimat *siap-siap PKB salam gigit jari*. Artinya, Muhaimin dan PKB sebenarnya berharap mendapat jatah kekuasaan. Jadi, implikatur inkonsistensi terhadap janji tersebut tidak hanya diarahkan pada Jokowi-JK, tetapi juga pada para pendukungnya. Implikatur umum yang diinginkan adalah jangan percaya pada janji-janji serta komitmen Jokowi-JK beserta para pendukungnya. Hanya saja, pesan politik terakhir ini memungkinkan terjadinya citra sebaliknya. Seperti diungkapkan Gupta (2000: 254) bahwa serangan politik seringkali dapat menyebabkan terjadinya efek bumerang (*boomerang effect*). Citra pendukung Jokowi-JK, seperti halnya Muhaimin Iskandar dan PBB, mungkin akan negatif, tetapi sebaliknya citra Jokowi-JK memungkinkan akan semakin positif. Tidak dilibatkannya Muhaimin dan PKB di Tim Transisi akan dinilai publik sebagai konsistensi Jokowi-JK terhadap janji bahwa koalisi mereka dibangun tanpa syarat.

KESIMPULAN

Dalam konteks komunikasi politik dan kajian tindak tutur, sebuah pesan politik yang mengungkap realitas tertentu, tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penyampaian informasi. Seringkali terdapat makna-makna implikatur dalam pesan-pesan politik tertentu. Pesan-pesan tersebut tidak hanya menyajikan realitas, tetapi sekaligus membangun realitas tertentu yang disesuaikan dengan motif politiknya. Dalam konteks komunikasi politik pascapilpres 2014, munculnya Gerakan Nasional Salam Gigit Jari tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk menyajikan ulang

potongan pernyataan tokoh dan atau kutipan berita di media. Senantiasa ada motif-motif politik tertentu yang menyertai produksi dan penyebaran pesan-pesan politik di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami maksud atau implikatur wacana retorika politik, terutama pesan-pesan dari kampanye negatif maka keberadaan teks, konteks, latar belakang, dan motif politik perlu diperhatikan. Dengan cara demikian, implikatur retorika politik akan lebih mudah untuk diketahui dan dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gupta, M.P. 2000. *Negative Political Advertising: Some Effects from the 13th Indian General Election 1999*. Global Bisnis Review. Diunduh pada 30 September 2014, dari <http://gbr.sagepub.com/content/1/2/249>.
- Kasali, Rhenald. 2011. *Cracking Zone*. Jakarta: Gramedia
- Lau, R.R. & Rovner, I.B. 2009. *Negative Campaigning*. The Annual Review of Political Science. Diunduh pada 6 Oktober 2013, 285-307, dari www.annualreviewa.org.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: teori, metode, dan aplikasi prinsip-prinsip analisis wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Partington, Alan. 2003. *The Linguistics of Political Argument: The spin-doctor and the wolf-pack at the White House*. New York: Routledge
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wijana, IDP dan Rohmadi, M. 2009. *Analisis Wacana Pragmatik*. Surakarta: Yuma Pustaka